

Kutipan :

" Halo Nasa : Maaf saya salah mendarat, ini bukan bulan, tapi ini jalan raya di indonesia! "

(JP 170207)

(JP 170204)

4 | SABTU 4 FEBRUARI 2017

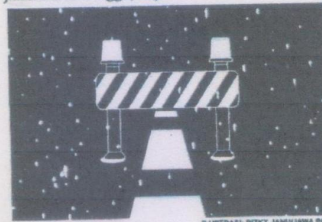
JATI DIRI

Membayangkan Kenyamanan

KENYAMANAN bagi warga negara, rasanya, sederhana. Beberapa adalah akses kesehatan yang terjangkau, harga pangan (termasuk cabai) yang masuk akal, pendidikan yang murah, hingga jalan raya yang untuk menghubungkan antarkota. Tentu masih ada kebutuhan lain pada tingkat-tingkat selanjutnya. Tapi, kalau tiga hal "sepele" itu saja tidak bisa diwujudkan, apalagi kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya lebih kompleks.

Jalan raya yang berantakan memang gampang sekali memancing gerutuan. Betapa tidak, dalam perjalanan antarkota -di Jatim, misalnya-, pemandangan jalan yang tidak layak itu terus-menerus ada di depan mata. Aspal yang bergelombang dan tersingkap, lubang-lubang besar yang menganga, hingga lapisan jalan mengelupas yang hanya menyisakan tanah.

Anda yang berada di Surabaya, misalnya. Pergilah ke luar kota lewat jalur mana pun. Ke barat, timur, selatan. Yang Anda lalui adalah jalan rusak. Enggak layak.



ILUSTRASI: NECT JAWABARA POE

Pengguna jalan akan gampang sekali menggerutu bahwa pemerintah tidak peduli kepada masyarakat. Jalan yang mereka lalui menggambarkan ketidakpedulian tersebut. Sudah kasatmata rusak, tidak kunjung diperbaiki secara memadai. Yang ada hanya perbaikan tambal sulam. Secukupnya. Yang penting sudah ditambal. Perkara besok bolong lagi, itu urusan besok.

Ya, yang diketahui warga hanya satu: jalan adalah tanggung jawab pemerintah. Mereka enggak mau repot-repot memilah, apakah pemerintah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. Pokoknya pemerintah.

Karena itu, para pamong pun tak bisa terus-menerus ngeles dengan berkilah bahwa itu adalah wewenang pemerintah pusat, itu adalah jalan milik provinsi, itu adalah jalan milik kabupaten, dan sebagainya. Dalam pemikiran sederhana masyarakat awam, pemerintah itu satu kesatuan. Mulai pusat sampai desa dan kelurahan.

Tapi, ngomong memang gampang. Faktanya, mengurus administrasi pemerintahan punya kisi-kisi yang berjibun. Terlebih soal anggaran. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mungkin bisa geregetan melihat jalan rusak di depan mata. Namun, mereka tak bisa begitu saja mengeluarkan duit untuk membetulkan jalan. Bukan wewenangnya. Salah-salah bisa kena "tebakan Batman" yang berujung penjara.

Siapa sih orang yang mau dicari-cari kesalahannya saat sudah tidak menjabat? Terlebih, perlakuan (juga *bullying*) untuk orang yang terjerat korupsi karena ketamakannya atau karena kesalahan prosedur administrasi itu sama.

Karena itu, perlu solusi taktis agar hal-hal "sepele" semacam jalan rusak tersebut bisa ditangani secepatnya. Tanpa harus lempar-lemparan kewenangan. Agar warga tidak lagi hanya bisa membayangkan kenyamanan. (*)

NO	DATA UTAMA	DATA PENUNJANG
11.	<p style="text-align: right;">Clekit</p>  <p>WARBYASAH! KITA BISA DAMAI, KITA JUGA BISA BERSATU. MARI JAGA SEMANGAT INI UNTUK BERSAMA-SAMA MEMBANGUN NKRI!</p> <p>Kutipan : " Warbyasah ! kita bisa damai, kita juga bisa bersatu, mari jaga semangat ini untuk bersama-sama membangun NKRI ! " (JP 161203)</p>	<p style="text-align: center;">JATI DIRI</p> <p style="text-align: center;">15 / 12 / 2016</p> <h3 style="text-align: center;">Menyambut Aksi 212</h3> <p>G ELOMBANG massa dari segenap penjuru tanah air untuk mengikuti aksi 2 Desember (212) semakin besar. Pemerintah telah melakukan segala cara untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan arus kedatangan massa dari daerah ke ibu kota. Tapi, aksi tersebut tidak bisa dicegah. Toh, itu adalah bagian dari hak warga negara untuk menyuarakan aspirasi. Yang harus dilakukan pemerintah ialah menyiapkan pola pengamanan agar aksi 212 berjalan tertib dan damai.</p> <p>Berkaca pada aksi 4 November (411) yang melibatkan ratusan ribu orang, Polri dan TNI menyiapkan skema pengamanan yang lebih baik untuk aksi 212. Hasil komunikasi dengan elemen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melahirkan kesepakatan. Yaitu, aksi 212 dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Tidak lagi dibiarkan bebas di jalan-jalan protokol ibu kota.</p> <p>Pemusatan aksi massa itu memudahkan kendali pengamanan. Konsekuensinya, harus disiapkan peranti pendukung. Misalnya toilet dan panggung, juga penentuan arah kiblat karena massa akan menjalakan salat Jumat. Polri dan GNPF MUI</p>  <p>juga sepakat bahwa aksi 212 hanya akan berlangsung lima jam. Mulai pukul 08.00 sampai 13.00. Ditambah dengan pembubaran massa, aksi tersebut diperkirakan benar-benar kelar pada pukul 15.00.</p> <p>Ibu prediksi di atas kertas. Di lapangan, semua kemungkinan bisa terjadi. Pada 411 disepakati, aksi massa berakhir pukul 18.00. Tapi, hingga batas waktu yang ditentukan, massa belum benar-benar bubar. Ribuan orang bertahan di sekitar istana ingin bertemu langsung dengan presiden. Entah bagaimana awalnya, kemudian pecah kerusuhan.</p> <p>Kita berharap aksi 212 berjalan damai. Suasana lebih sejuk. Tuntutan penyelesaian hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuai titik terang. Penanganan kasus tersebut sedang berjalan. Setelah polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka, berkas kasus itu kini berada di kejaksaan. Kemarin kejaksaan menyatakan bahwa pemeriksaan berkas selesai dan dinyatakan P-21. Artinya, dalam waktu yang tidak lama lagi, kasus tersebut bergulir di pengadilan.</p> <p>Proses peradilan masih akan berjalan dalam beberapa waktu ke depan. Sambil menunggu dan terus mengawal persidangan Ahok, kita tentu berharap suasana negara semakin kondusif. Aksi turun ke jalan memang tidak dilarang. Tapi, akan lebih baik jika energi itu kita gunakan untuk kerja, kerja, kerja.</p> <p>Rindu rasanya melihat presiden blusukan lagi ke segenap penjuru Indonesia untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Itu jelas lebih baik daripada melakukan safari ke mana-mana dan bergantian menjamu tokoh politik dengan dalih mendinginkan suasana. (*)</p>



Kutipan :

2017

" Ikutan Bro !! BBM non subsidi, harga cabai, tarif STNK/ BPKB, tarif listrik. "

(JP, 170117)

Cleki (JP 170112)

4 | KAMIS 12 JANUARI 2017

JATI DIRI

Kado Kenaikan Harga Awal Tahun

AWAL tahun ini masyarakat Indonesia mendapat kado spesial: kenaikan harga. Mulai harga BBM nonsubsidi, tarif listrik, biaya mengurus STNK dan BPKB, hingga harga cabai. Semua datang bertubi-tubi. Di sisi lain, pendapatan masyarakat secara riil tak menunjukkan kenaikan berarti. Beban yang dipikul masyarakat pun terasa kian berat.

Masyarakat memang tak bisa menolak. Sebab, kenaikan tarif listrik, biaya STNK, dan harga BBM nonsubsidi tersebut sudah menjadi keputusan pemerintah. Misalnya tarif listrik. Biaya setrum itu naik untuk sebagian masyarakat yang dinilai tidak layak menerima subsidi. Lalu, biaya STNK dan BPKB dinaikkan untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Tapi, soal kenaikan harga cabai, mestinya hal itu tak perlu terjadi di negeri yang dikenal subur ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi kambing hitam kenaikan harga cabai selalu faktor cuaca dan distribusi. Musim hujan membuat panen cabai di sejumlah daerah kurang berhasil sehingga mengurangi suplai. Faktor cuaca juga menghambat distribusi cabai dari sentra produksi ke daerah lain. Hal-hal tersebut menjadi penyebab kenaikan harga di sejumlah daerah.



ILUSTRASI: AGUNG KAJAWA POS

Yang menjadi persoalan, sudah tahu hal itu selalu menjadi problem kenaikan harga, mengapa pemerintah tak pernah ada solusi? Apakah tidak pernah insentif sehingga problem yang sama tidak terjadi tiap tahun? Nah, di sinilah dibutuhkan *leadership* yang kuat dalam menyelesaikan masalah rantai pasokan pangan yang kerap terjadi.

Bukan hanya masalah komoditas lain juga sering naik-turun tiba-tiba. Akar masalahnya adalah ketidakseimbangan permintaan dan penawaran gara-gara tak lancarnya arus distribusi. Solusinya juga biasanya serba sama, yakni melakukan impor atau menjual ke pihak lain yang dinilai bertanggung jawab.

Tapi sayang, melambungnya harga cabai itu tidak sampai dinikmati petani. Di sejumlah daerah, produk dari petani tetap dibeli dengan harga rendah. Para spekulan, pedagang, dan pengepullah yang menikmati kenaikan harga cabai. Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam menstabilkan harga sekaligus menjaga rantai pasokan.

Tren kenaikan harga juga bisa digunakan sebagai momentum perbaikan kesejahteraan petani yang selama ini belum menikmati hasilnya. Sementara itu, para spekulan dan pengepul yang selama ini telah menikmati banyak hasil sudah suatunya "sedikit berbagi". Bila kebijakan secara lintas sektoral disinergikan dengan optimal, problem-problem yang tiap tahun berulang bisa dipastikan bakal berkurang. (*)

JATI DIRI

Senin, 26/12/2016

Merawat Ke-Bhinneka-an

BARANGKALI Anda juga merasakannya. Akhir-akhir ini isu benuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) begitu banyak bersebar.

Di media sosial, grup e-mail, grup WhatsApp, grup BBM, hingga di situs-situs internet yang kian mejamur ribuan jumlahnya.

Sayang, sebagian masyarakat begitu mudah termakan isu-isu semacam itu. Tak peduli profesi maupun latar belakang pendidikannya, seringkali ikut menyebarkan (*share*) informasi yang derajat validitasnya tak lebih dari isu atau kabar burung. Lalu, membombardir dengan komentar-komentar tajam penuh syak wasangka. Ritual tabayun atau identifikasi seolah tak diminat.

Label "kafir" pun begitu mudah disematkan oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya. Begitu pula cap "minoritas dan mayoritas" yang begitu mudah terloncar dalam sergahnya hujatan. Ada yang bilang, teman ketbangsaan kita mulai koyak di sini-sini. Barangkali, ada benarnya juga.

Karena itulah, akhir tahun menjadi momen tepat untuk introspeksi dan mawas diri. Isu ancaman konflik dan disintegrasi bangsa memang samir terdengar, tapi tak boleh disepelekan.

Kualitas kita sebagai bangsa yang besar sudah cukup teruji. Pemberontakan-pemberontakan di awal republik ini berdiri, revolusi 1965, hingga krisis multidimensi pada 1998 sudah berhasil dilalui.

Di akhir 1990-an, ketika Indonesia terhuyung diterjerai badai krisis moneter dan kesusahan benuansa SARA, banyak yang memramalkan Indonesia akan terjankit virus balkanisasi, pecah berkeping-keping seperti negara-negara di Semenanjung Balkan.



Yugoslavia, negara kuat yang terdiri atas enam etnis (Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia), tak kuasa menahan deraan krisis politik, lalu tercerai-berai pada awal 1990-an. Pembantaian etnis yang memulikan mewarnai sejarah kelam perpecahan bangsa Eropa itu.

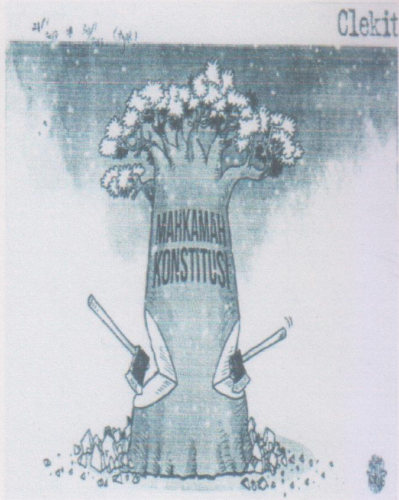
Tapi, rupanya bangsa kita lebih kuat daripada Yugoslavia. Mimpi buruk perpecahan pada 1998 tak terjadi. Padahal, Indonesia tidak hanya terdiri atas enam etnis seperti Yugoslavia. Indonesia memiliki 300-an kelompok etnis besar. Jika ditambah dengan etnis-ethnis kecil yang tersebar di seuruh pelosok negeri, jumlahnya mencapai 1.340 suku bangsa (data sensus BPS 2010).

Apa kuncinya? Ke-Bhinneka-an. Karena itulah, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus diukir. Kita bisa mulai dari sendiri. Misalnya, dengan selektif serta tak mudah menyebarkan informasi benuansa SARA yang belum jelas kebenarannya.

Pemerintah juga harus bekerja lebih keras. Isu SARA mudah menyebar di tengah ketimpangan ekonomi. Angka rasio Gini 0,397 adalah alarm yang harus diwaspadai. Makin lebar jurang antara si kaya dan si miskin, makin mudah isu SARA memantik amarah. Karena itu, asas pemerataan dan inklusivitas harus menjadi roh kebijakan ekonomi pemerintah.

Demikianlah, semoga ke-Bhinneka-an bangsa ini senantiasa jadi berkah, bukan musibah. (*)

9.



Kutipan :

“ Mahkamah Konstitusi ” (JP 170128)

(JP 170130)

SENIN 30 JANUARI 2017

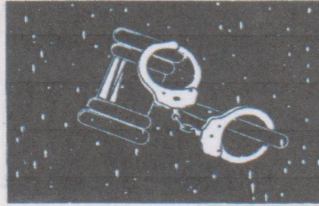
JATI DIRI

Hormati Proses Hukum Patrialis

OPERASI tangkap tangan (OTT) salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menuai kontroversi. Sebagian kalangan menganggap ada rekayasa yang mengiringi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Patrialis beserta tiga tersangka lain dalam kasus penerimaan suap terkait pengurusan sidang pengadilan uji materi (*judicial review*) UU Pemberantasan itu.

Tuduhan rekayasa tersebut muncul di media sosial. Sebagian lagi muncul di situs berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Ada yang menyebutkan bahwa Patrialis sedang di-luthi Hasan Isahaaq (LHI)-kan. Itu merujuk pada asumsi mereka bahwa penangkapan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa tahun lalu tersebut merupakan skenario besar untuk mengerdilkan citra partai Islam.

Sebagian lagi menganggap KPK telah bertindak tidak adil dalam kasus Patrialis. Kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras -yang sudah ada kesimpulan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)- ternyata tidak segera ditindaklanjuti.



ILUSTRASI: RIZKY JAMBURANA FOR

Mereka boleh saja berpendapat. Di Indonesia, dengan iklim demokrasi yang sedemikian bebasnya, siapa pun dapat mengeluarkan opininya. Soal benar tidaknya opini tersebut, itu urusan nanti. Dan semua tuduhan tersebut memang belum bisa dibuktikan. Semua masih sebatas asumsi.

Bahkan, penuding berani menganalisis secara serampangan proses hukum di pengadilan tipikor yang sudah melewati pembuktian yang mekanismenya telah diatur dalam perundang-undangan. Bukan itu saja. Mereka juga berusaha memotivasi proses hukum Patrialis dengan gonjang-ganjing pilkada DKI.

Tentu saja, asumsi sepihak itu patut disesalkan. Mengapa? Sebab, di tengah proses hukum yang sedang berjalan di KPK, ada sebagian pihak yang sudah merasa pesimis karena menduga ada titipan kepentingan dalam kasus tersebut. Padahal, sebagaimana diakui pimpinan KPK, semua proses hukum, termasuk hasil OTT, berdasar adanya pengaduan dan pengumpulan alat bukti.

Kita sebaiknya menahan diri dengan memberikan kesempatan kepada KPK untuk menindaklanjuti semua temuannya dalam kasus korupsi. Termasuk hasil OTT Patrialis. Rasanya tidak elok jika kita memunculkan opini yang seolah-olah mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. Kita khawatir tuduhan yang beredar memunculkan bias kepentingan di luar penyidikan. Bila itu terjadi, tentu proses hukum akan terganggu.

Kepada KPK, kita juga berharap jangan bermain-main dalam penegakan hukum. Mereka harus terus diingatkan agar jangan sampai proses hukum dibumbui kepentingan politik. Kita tidak ingin mempertaruhkan tingginya kepercayaan publik kepada KPK dengan kepentingan politik praktis. (*)



Kutipan :

" Pak Polisi ! ada lambang palu arit di pantat borang ini ! "

" Asem ! ini bekas korengan Brur !! "

(JP 170125)

4 | RABU 25 JANUARI 2017

JATI DIRI

Melindungi Jaksa Pemas

PEMANDANGAN janggal kembali dipertontonkan Korps Adhyaksa Ahmad Fauzi, jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang memeras Rp 1,5 miliar, hanya dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidi 3 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Pengunjung sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terperangah saat JPU membacakan tuntutanannya kemarin (24/1).

Bandingkan dengan tuntutan dalam kasus serupa yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Rohadi yang menerima suap Rp 250 juta dalam kasus Saipul Jamil dituntut 10 tahun penjara. Begitu juga hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Anner Purba yang menerima uang Rp 150 juta dalam kasus nonor RS Bengkulu, dituntut 10 tahun penjara.

Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution yang "hanya" menerima suap Rp 50 juta untuk memuluskan peninjauan kembali dituntut 8 tahun penjara. Kasubdit Kasasi Perdata MA Andri Sutrisna yang menerima uang Rp 400 juta untuk menunda salinan putusan dituntut 13 tahun penjara.



ILUSTRASI: DAVID JANA / OS

Dari contoh-contoh di atas, jelas sekali ada yang tidak beres dengan tuntutan JPU kepada Fauzi. Uang yang diterima Fauzi jauh lebih besar: Rp 1,5 miliar. Sewajarnya tuntutan JPU lebih dari tuntutan para terdakwa suap lainnya. Dilihat dari logika apa pun, tidak selayaknya jaksa Fauzi—yang pernah menyebut para ahli hukum yang bersaksi di pengadilan sebagai pelacur akademik itu—hanya dituntut ringan.

Sejak awal kejaksaan memang terlihat melindungi Fauzi. Mentang-mentang yang diadili adalah rekan sendiri, JPU sudah tidak menggunakan asas keadilan dalam menyampaikan tuntutan. Penyidikan terhadap Fauzi selama ini juga tidak transparan.

Selain itu, JPU sengaja menempatkan Fauzi yang merupakan orang dekat Kepala Kejati Jawa Timur Maruli Hutagalung sebagai pelaku tunggal. Padahal, dalam menangani kasus dugaan korupsi penjualan tanah kas desa di Sumenep tersebut, Fauzi hanyalah anggota tim. Tidak masuk akal kalau Fauzi bermain sendiri. Sebab, sebagai anggota tim, dia tidak bisa memutuskan sendiri segala hal terkait kasus itu.

Fauzi juga tidak ditahap di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, sebagaimana para tahanan lainnya. Dia "diamankan" di Lapas Delta, Sidoarjo. Sulit mengharap kejaksaan saat ini bertindak profesional. Penanganan kasus Fauzi seharusnya bisa dijadikan momentum oleh kejaksaan untuk memperbaiki citranya.

Demi keadilan, mudah-mudahan saja hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat daripada tuntutan JPU. Mudah-mudahan pula Presiden Joko Widodo yang tengah menggeluti hobi barunya, memanah, semakin yakin untuk melakukan reformasi total di tubuh kejaksaan. (*)



Kutipan :
 "PILKADA DKI (PUTARAN KEDUA)
 Semoga laris..." (JP 170218)

4 | JUMAT 17 FEBRUARI 2017

JATI DIRI

Akhiri Sikap Antitoleransi

Putaran pertama pilgub DKI Jakarta sudah berakhir. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memastikan diri lolos ke putaran kedua pilgub yang sedianya digelar pertengahan April mendatang.

Sementara itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni secara resmi sudah lempar handuk. Secara kesatria, AHY mengaku lapang dada menerima kealahannya dan mengucapkan selamat kepada rivalnya. Sebuah langkah kenegarawanan yang patut diapresiasi.

Hanya, rupanya masyarakat Indonesia punya tradisi yang tak baik di media sosial terkait pilihan politik. Media sosial menjadi tempat meliarkan ujaran kebencian. Baru beberapa saat AHY bersikap jantan dengan mengakui kealahannya dan banyak pihak yang memuji, sudah ada yang membuat sarkasme.

Para pendukung kubu tertentu melontarkan sarkasme "mendadak AHY". Mereka menyebut orang yang memuji sikap AHY itu melakukannya karena hendak merah sipati dan merampas suaranya. Yang juga tak kalah meresahkan adalah penggunaan isu agama sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan-pasangan tertentu.



ILUSTRASI: DAVID PRASETYO/GAMA POC

Memang hak beragama sebagian umat untuk meyakinkannya. Namun, juga menjadi hak sebagian lain untuk tidak. Apalagi, konsep kepemimpinan di negara demokrasi modern sejatinya sudah memiliki perubahan makna. Gubernur bukan raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Gubernur dalam era modern adalah bagian dari pelayan publik. Memang pada pelaksanaannya kadang pejabat bertingkah seolah raja. Namun, dalam kasus seperti itu masyarakat punya hak untuk mengkritik, mengoreksi, atau malah menggugatnya.

Dalam politik, sah-sah saja menggunakan bermacam metode untuk menang. Namun, penyalahgunaan dan politisasi agama yang berlebihan akan berakibat tidak baik bagi semua. Selain agama terasa jadi "murah", juga mengancam kesatuan dan persatuan.

Dunia internasional turut menyoroti pelaksanaan pilgub DKI. Mereka juga ketir-ketir ketika Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang paling toleran akan jatuh dalam radikalisme. Mereka merasa pilgub DKI adalah sebuah pertarungan.

Apa pun, esensi pilgub adalah memilih seseorang yang cakap mengatur birokrasi untuk melayani kepentingan publik dengan baik. Jadi, tak perlu berlebihan menyikapinya. Boleh mempunyai keyakinan tertentu dalam memilih calon jagoannya, tapi setidaknya tak perlu sampai kemudian membeci orang lain yang seiman tapi berbeda pandangan.

Meri diakhiri sikap antitoleransi yang telah terjadi. Mari kembangkan sikap saling menghormati keyakinan terhadap preferensi orang lain. Apalagi, dalam politik, tak ada pertemanan yang abadi. Jagoan yang kita bela sampai rela mengorbankan apa pun di kemudian hari bisa bergandengan tangan dengan lawannya. (*)

JATI DIRI

Akhiri Sikap Antitoleransi

Putaran perdana pilgub DKI Jakarta sudah berakhir. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memastikan diri lolos ke putaran kedua pilgub yang sedianya digelar pertengahan April mendatang.

Sementara itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni secara resmi sudah lempar handuk. Secara kesatria, AHY mengaku lapang dada menerima kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada rivalnya. Sebuah langkah kenegarawanan yang patut diapresiasi.

Hanya, rupanya masyarakat Indonesia punya tradisi yang tak baik di media sosial terkait pilihan politik. Media sosial menjadi tempat inelarian ujaran kebencian. Baru beberapa saat AHY bersikap jantan dengan mengakui kekalahannya dan banyak pihak yang memuji, sudah ada yang membuat sarkasme.

Para pendukung kubu tertentu melontarkan sarkasme "mendadak AHY". Mereka menyebut orang yang memuji sikap AHY itu melakukannya karena hendak meraih simpati dan merampas suaranya. Yang juga tak kalah meresahkan adalah penggunaan isu agama sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan-pasangan tertentu.



ILUSTRASI: DAVID PRASETYO/JAMA FOX

Memang hak beragama sebagian umat untuk meyakinkannya. Namun, juga menjadi hak sebagian lain untuk tidak. Apalagi, konsep kepemimpinan di negara demokrasi modern sejatinya sudah memiliki perubahan makna. Gubernur bukan raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Gubernur dalam era modern adalah bagian dari pelayan publik. Memang pada pelaksanaannya kadang pejabat bertingkah seolah raja. Namun, dalam kasus seperti itu masyarakat punya hak untuk mengkritik, mengoreksi, atau malah menggugatnya.

Dalam politik, sah-sah saja menggunakan bermacam metode untuk menang. Namun, penyalahgunaan dan politisasi agama yang berlebihan akan berakibat tidak baik bagi semua. Selain agama terasa jadi "murah", juga mengancam kesatuan dan persatuan.

Dunia internasional turut menyoroti pelanggaran pilgub DKI. Mereka juga ketir-ketir ketika Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang paling toleran akan jatuh dalam radikalisme. Mereka merasa pilgub DKI adalah sebuah pertarungan.

Apa pun, esensi pilgub adalah memilih seseorang yang cakap mengatur birokrasi untuk melayani kepentingan publik dengan baik. Jadi, tak perlu berteluh menyikapinya. Boleh mempunyai keyakinan tertentu dalam memilih calon jagoannya, tapi setidaknya tak perlu sampai kemudian membeci orang lain yang seiman tapi berbeda pandangan.

Mari diakhiri sikap antitoleransi yang telah terjadi. Mari kembangkan sikap saling menghormati keyakinan terhadap preferensi orang lain. Apalagi, dalam politik, tak ada pertemanan yang abadi. Jagoan yang kita bela sampai rela mengorbankan apa pun di kemudian hari bisa bergandengan tangan dengan lawannya. (*)



Kutipan :

PILKADA DKI JAKARTA

" Sampean ini menghabiskan energi dan emosi untuk pilkada DKI padahal bukan pemilih atau panitia di sana, hidup sampean pasti berat banget, saya turut prihatin..." (JP 170216)

JATI DIRI

Selanjutnya, Kawal Janji Pemenang

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) secara serentak telah dilaksanakan di 101 daerah kemarin (15/2). Meski belum ada hasil secara *real count*, rata-rata tiap-tiap daerah sudah bisa mengetahui pasangan calon (paslon) yang menang. Atau apakah pilkada berlanjut ke putaran kedua atau cukup satu putaran saja.

Satu hal yang cukup menggembirakan, pilkasan keamanan mengonfirmasi bahwa pelaksanaan pilkada 2017 berjalan lancar. Memang ada sejumlah kejadian kecil. Misalnya dugaan pembakaran rumah calon gubernur Gorontalo Hana Hasarrah. Atau keributan kecil di TPS 18 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, yang melibatkan sekelompok pria berbaju kotak-kotak dengan wangi. Namun, berbagai kejadian itu tidak sampai membatalkan pelaksanaan pemungutan suara.

Jika dibandingkan dengan masa kampanye, tentu ketegangan pada saat pemungutan suara kemarin tidak ada apa-apanya. Masa kampanye terlalu banyak dikotori informasi-informasi sampah, fitnah, dan serangan personal yang berkebaran melalui media sosial.



Di banyak daerah memang masih akan berlangsung pemungutan suara putaran kedua. Misalnya pilkada DKI Jakarta yang punya aturan khusus bahwa pemenang harus mengumpulkan 50 + 1 persen suara. Hampir bisa dipastikan, tidak ada paslon di DKI yang mencapai angka itu pada putaran pertama. Di daerah lain juga tidak sedikit paslon yang perolehan suara terunggunya tidak sampai 30 persen sehingga harus berlanjut ke putaran kedua April mendatang.

Namun, untuk saat ini, harapan umum adalah paslon yang kalah atau gugur pada putaran pertama bisa legawa. Tak perlu memperpanjang persoalan. Apalagi, Undang-Undang Pilkada sudah mengatur selisih perolehan suara yang bisa digugat, yakni di kisaran 0,5 sampai 2 persen, bergantung jumlah penduduk. Jika selisih suara di atas angka itu, paslon tidak bisa menggugat.

Daripada membuat gaduh lewat media sosial, ada baiknya saat ini berpikir lebih rasional. Untuk pemilih yang masih menunggu putaran kedua, jangan mudah percaya dengan informasi-informasi personal tentang paslon yang berkebaran di dunia maya. Percayalah, sumber informasi itu lebih banyak berasal dari tim sukses paslon. Kebenarannya amat sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada banyak media massa yang terikat hukum, etika, dan tanggung jawab terhadap kebenaran berita. Informasi-informasi dari metekalah yang sebenarnya lebih bisa dipercaya.

Bagi pemilih yang jagoannya menang, tak perlu lama-lama bereuforia. Anda justru punya tanggung jawab agar kepala daerah terpilih bekerja sesuai harapan. Jangan pernah lupa janji-janji selama masa kampanye. Bila perlu ditulis untuk menjadi pengingat. Suatu saat, jika sang kepala daerah lupa, Anda tinggal menagih janji-janji itu. Hal yang sebenarnya harus dilakukan seluruh masyarakat di daerah penyelenggara pilkada. (*)



Kutipan :

" Ya Tuhan... semoga pilkada serentak besok lancar dan aman, kami sudah bosan dengan segala kegaduhan..." (JP 170214)

JATI DIRI

Mari Tenang pada Masa Tenang

HIRUK pikuk menjelang pilkada untuk sementara mereda. Mulai Minggu (12/2) hingga Selasa (14/2) berlangsung masa tenang yang merupakan salah satu tahapan penting sebelum hari pemungutan suara pilkada pada 15 Februari.

Selama masa tenang, semua pihak yang terkait dengan pilkada, mulai calon kepala daerah, tim sukses, hingga simpatisan, diharapkan tidak mengumbar aksi bermuatan kampanye yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat.

Dari pemantauan hari pertama masa tenang, memang tidak ditemukan aktivitas pengumpulan massa secara signifikan oleh para pihak yang terkait dengan pilkada. Semua menaati aturan main masa tenang.

Sebaliknya, di media sosial sebagian simpatisan masih saja melontarkan pernyataan dukungan kepada kandidat yang dijagokan. Sikap mereka memang wajar-wajar saja. Sebab, di alam demokrasi memang dibenarkan siapa saja mengemukakan opini, sekalipun pada masa tenang pilkada. Toh, Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan pilkada sebatas mengeluarkan imbauan tanpa kekuatan hukum mengikat bagi siapa saja yang melontarkan opini dukungannya. Hanya, dari sisi etika, sikap simpatisan itu sebaiknya tidak dikeluarkan. Apalagi, sejak awal para kandidat jelas-jelas meneken pakta pilkada damai. Semua pihak memang patut menghormati aturan main selama masa tenang.



ILUSTRASI: DAVIDJUMA POS

Menjelang hari pemungutan suara, yang tak kalah penting adalah antisipasi politik uang (*money politics*) kepada calon pemilih. Kita menyadari bahwa *money politics* adalah nusuh terbesar selama ajang pemilihan. Kita juga mengakui bahwa politik uang bukan fenomena baru di Indonesia. Secara kultural, *money politics* merupakan bagian aktivitas politik yang terjadi di level *grass roots* hingga elite. Semua tak lepas dari standar politik Orde Baru dalam membangun jaringan dukungan politik yang hingga kini belum memudar. Kita masih berjuang untuk membebaskan budaya politik dari politik uang. Seiring misi tersebut, kita sepatutnya mulai belajar menahan godaan politik uang dalam pilkada kali ini. Calon pemilih seharusnya menempatkan idealisme sebagai panglima dalam menentukan pilihan politik. Bila kita mempertahankan politik uang, ongkos politiknya cukup mahal. Kita tidak ingin mempertaruhkan masa lima tahun hanya demi selembar-dua lembar uang.

Akhirnya, masa tenang saat ini menjadi ajang pembuktian apakah demokrasi di negara ini bisa bebas dari fanatisme sempit dan politik uang. Mari kita percayakan semua urusan kepada sistem pemilihan yang ada. Berikanlah kesempatan kepada KPU, Bawaslu, kepolisian, serta para pihak terkait pemungutan suara untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pilkada. Kalaupun ada pelanggaran, mereka sudah pasti tahu tindakan apa yang harus dilakukan. (*)

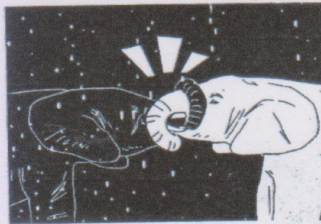
JATI DIRI

Akrobat Baru Antasari

APAKAH kita, rakyat biasa, perlu bertepuk tangan atas akrobat politik yang dipertontonkan pesohor di Jakarta? Bahkan, kita pun menjadi terbiasa dengan kejutan dan manuver para politikus di lingkaran kekuasaan.

Maka, ketika mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar melayangkan tudingan kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita pun menunggu drama apa lagi yang akan diputar. Seperti telah disampaikan, SBY tentu tidak terima atas tuduhan sebagai dalang kriminalisasi terhadap terdakwa kasus pembunuhan yang baru saja mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Ya. Grasi Jokowi. Pengampunan yang tak pernah diberikan *predecessor*-nya.

Sama-sama menempuh jalur hukum memang jalan terbaik. Namun, tetap saja semua itu tidaklah berada dalam ruang hampa. Sulit membantah dugaan bahwa serangan Antasari tersebut sengaja dilakukan pada H-1 pilkada DKI Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang tak memiliki sangkut paut dengan Antasari. Tapi, kita semua tahu bahwa naik turunnya pamor mantan teatara itu bergantung pula pada popularitas SBY, sang ayah.



ILUSTRASI: RIZKY JAMUJAWA FOR

Adalah hak penuh Antasari berkali-kali pengikis Bareskrim Polri guna membeberkan kasusnya. Jika memiliki bukti, dia juga berhak menuding SBY. Toh, memang SBY yang menjadi penguasa ketika itu. Privilese penghormatan sebagai mantan presiden juga bisa dikesampingkan karena SBY masih tetap memimpin partai.

Namun, kita juga boleh saja skeptis terhadap Antasari. Tanpa bukti yang dibeber, tudingan Antasari tetap belum bisa dijadikan satu-satunya acuan. Apalagi, selama menjadi ketua KPK, Antasari juga terbiasa berakrobat sendiri. Publik tentu masih ingat ketika Antasari bertemu dengan Anggodo Widjojo, saudara Anggodo Widjojo, buron kasus korupsi ketika itu.

Lagi-lagi, elite yang bertengkar, tapi rakyat yang dipaksa menentukan kubu. Padahal, kita semua tahu bahwa perkongsian elite selalu murni arena kepentingan. Tudingan Antasari kepada pengusaha Hary Tanoesoedibjo telah menunjukkan hal itu. Hary Tanoesoedibjo belum tentu bertindak seperti yang ditudingkan Antasari. Belum tentu dia menjadi penyampai pesan agar Aulia Pohan, besan SBY, tidak ditahan. Namun, kita seperti diingatkan bahwa pada sebuah masa, Hary Tanoesoedibjo pernah dekat dengan SBY. Kedekatan yang akhirnya buyar.

Lagi-lagi, elite yang bertengkar, tapi rakyat yang dipaksa menentukan ke mana harus berpihak. Seperti hari ini. Ketika rakyat Jakarta menentukan siapa yang layak menjadi gubernur. Bukan sekadar posisi gubernur. Namun juga pertarungan kekuasaan yang lebih besar. (*)



Kutipan :

"Mendoakan yang baik.....jangan suka membandingkan.....jangan merekoki....jangan sedikit-sedikit curhat."

"Ini berlaku untuk semua mantan...."
(JP 170204)

SENIN 6 FEBRUARI 2017

JATI DIRI

Mengawal Pilkada Serentak

INI pekan krusial bagi Indonesia. Pilkada serentak 15 Februari makin dekat. Tensi politik pun kian panas. Total 101 daerah yang terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, siap siaga menyambut pesta demokrasi.

Kita patut bersyukur, gelaran Pilkada sebelumnya pada 2015 lalu, berlangsung relatif lancar. Hanya ada beberapa riak kecil seperti kasus kerusuhan usai pemungutan suara di Kalimantan Utara.

Tapi, Pilkada kali ini memang beda. Selain jumlahnya yang banyak dan tersebar merata di berbagai wilayah, juga berlangsung di wilayah yang punya rekam jejak konstelasi politik tinggi: Jakarta, Aceh, dan Papua.

Bahkan, untuk perebutan kursi gubernur DKI Jakarta banyak orang mafhum sebagai pilkada rasa pilpres. Tokoh-tokoh sekaliber Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung membantu para calon gubernur.



Tensi yang kian tinggi sebenarnya wajar-wajar saja. Namun, menjadi tidak wajar jika dibumbui isu-isu miring bermuara suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sungguh sayang, isu SARA makin banyak menyebar di dunia maya.

Hal itu diperparah dengan merajalelanya berita palsu alias hoax. Kian hari, intensitas penyebaran hoax makin tinggi. Ini tentu sangat meresahkan. Pertama, isu yang disebarakan bertendensi memicu kebencian dan permusuhan dengan kelompok tertentu. Kedua, sebagian masyarakat kita masih mudah terhasut dan percaya dengan informasi hoax yang tak terkonfirmasi.

Tentu, menahan gempuran hoax bukan perkara mudah. Negara maju dedengkot demokrasi seperti Amerika Serikat (AS) pun harus pontang-panting melawan gencarnya hoax saat pilpres yang akhirnya mengantarkan Donald Trump ke Gedung Putih itu.

Karena itu, butuh sinergi semua pihak. Menjaga kondisi agar kondusif tak hanya jadi tugas aparat kepolisian, tapi juga semua warga masyarakat. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang tidak jelas. Jangan segan untuk meluruskan hoax dan jangan mudah menyebar informasi-informasi yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya.

Pihak penyelenggara Pemilu juga harus bekerja profesional dan cepat tanggap dengan isu-isu miring yang beredar di masyarakat. Para calon kepala daerah yang berkompetisi dan tim suksesnya, juga harus menyadari bahwa cara-cara tidak sportif yang digunakan, tidak hanya akan mencederai pesta demokrasi, tapi juga berpotensi memicu konflik horizontal yang mencemaskan.

Mari berdo'a dan berupaya, agar gelaran pilkada serentak yang tinggal hitungan hari ini bisa berlangsung lancar dan aman. Baik saat pemungutan suara, hingga rangkaian penghitungan suara. Ketidakpuasan atas hasil pilkada harus disalurkan melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan anarki. (*)

JATI DIRI

Kelapangan Hati Ulama

CONTOH baik sudah diberikan oleh KH Ma'ruf Amin. Tidak sekadar memberikan maaf, rais am PB NU tersebut juga meminta segerap *nahdliyyin* untuk tenang. Padahal, perlakuan pengacara terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama terbelang tidak pantas untuk sosok sekaliber beliau.

Ahok -sapaan Basuki Tjahaja Purnama- memang juga cepat mengambil langkah minta maaf. Hal yang setidaknya bisa membuat KH Ma'ruf Amin merasa legawa. Itu adalah sebuah blunder bagi Ahok dan timnya. Membuat kesalahan yang tidak perlu dan menimbulkan rasa yang tidak perlu. Sudah seharusnya itu menjadi pelajaran bagi Ahok dan timnya untuk lebih paham dengan siapa dan dalam konteks apa dirinya bertindak, berbuat, serta berkata-kata.

Islah dan emosi yang muncul di kalangan *nahdliyyin* pun cepat mereda. Sekjen ISNU M. Kholid Syeirazi dalam status medsosnya Rabu lalu menyatakan, "Ahok sudah minta maaf. Ya dimaafkan. Saya baru saksikan videonya di *YouTube*. NU *gak seneng* bikin repot. Insya Allah guru kami juga maafkan Ahok. Protes dan pernyataan kita sudah cukup. Sekarang serahkan lagi proses di pengadilan."

Status itu menjelaskan sikap sejati NU dalam kehidupan berbangsa. Mereka memilih *tawassuth* (moderat), sebuah sikap yang jauh lebih berat diambil ketimbang sikap ekstrem. Baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan.



ILUSTRASI: NEDJI AGUNGJAWA PIS

Menurut Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, bersikap *tawassuth* itu perlu hujah, kecakapan argumentasi, dan kelapangan hati. Sebuah sikap melindungi, mengayomi, dalam kerangka kebinekaan.

Itu menjelaskan bagaimana kiai-kiai NU mengambil sikap ketika diserang. Masih segar dalam ingatan bagaimana KH Mustofa Bisri memaafkan seorang pemuda yang menyerangnya dengan kata-kata tak sopan di *Twitter*. Bukan balas menghardik, Gus Mus bahkan meminta perusahaan tempat pemuda itu bekerja tidak memecatnya. Persoalan sudah selesai ketika pemuda itu diantar orang tuanya sowan ke Rembang untuk meminta maaf.

Sama dengan yang dilakukan oleh KH Ma'ruf Amin. Beliau tidak sekadar memberikan maaf, tetapi juga meminta kalangan *nahdliyyin* untuk tenang. Sebuah sikap yang patut menjadi panutan semuanya.

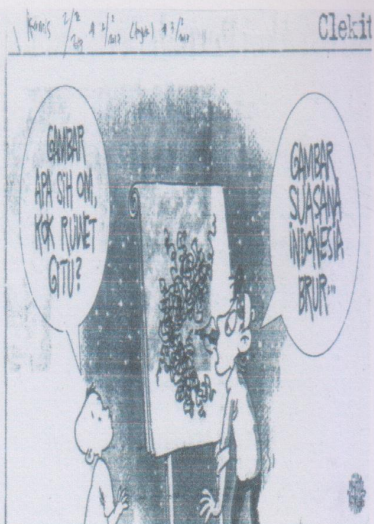
Karena itu, sangat mengherankan jika di dalam media sosial masih banyak yang justru memanas-manasi suasana. Bahkan merasa tidak terima. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya banyak yang ingin NU marah terhadap Ahok untuk alasan kepentingan kelompoknya sendiri.

Sudah teralalu banyak energi yang dihabiskan masyarakat dalam pertengkaran politik horizontal itu. Sudah waktunya media sosial kembali menjadi tempat yang menyenangkan. Bukan tempat mengumbar emosi-emosi politik. Sudah waktunya untuk kembali melihat persamaan, bukan perbedaan. Di dunia yang mulai terpolarisasi dengan ekstremisme, yang dibutuhkan adalah kelapangan hati dan cinta kasih seperti yang ditunjukkan para ulama kita. Bukan kegarangan ataupun permusuhan. (*)

N
O
3

DATA UTAMA

DATA PENUNJANG



Kutipan :

“ Anak kecil : Gambar apa itu Om, kok ruwet gitu? ”

Laki-laki : Gambar suasana Indonesia brur... ”

(JP 170202)

... NAMIS 4 FEBRUARI 2017 ...

JATI DIRI

Indonesia Bukan Hanya Jakarta

PEMILIHAN gubernur (pilgub) DKI Jakarta sebetulnya merupakan satu di antara 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. Namun, Jakarta memang "istimewa". Sorotan publik seolah terfokus ke ibu kota. Media seolah berlomba menyajikan serunya pertarungan tiga pasangan yang akan memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta.

Padahal, sekali lagi, ada 100 daerah lain di penjuru Nusantara yang juga akan memilih pemimpinnya secara langsung pada 15 Februari nanti. Ada 6 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota selain Jakarta yang melaksanakan pesta demokrasi dua pekan lagi. Tetapi, yang paling "ramai" memang pilgub Jakarta. Harus diakui, menjadi gubernur Jakarta lebih bergengsi daripada gubernur-gubernur lain.

Jakarta adalah ibu kota. Gubernur Jakarta pasti lebih terkenal ketimbang pemimpin provinsi lain. Secara finansial, pendapatan gubernur Jakarta juga jauh lebih banyak daripada gubernur Kalimantan Utara, misalnya. Jangan lupa, dari kursi gubernur Jakarta-lah seorang Joko Widodo (Jokowi) berhasil melenggang ke posisi orang nomor satu di Indonesia.

Bisa jadi, rentetan keistimewaan itulah yang membuat partai politik bertarung habis-habisan memperebutkan kursi gubernur Jakarta. Intrik dan saling sikut antarkontestan sangat vulgar. Boleh kalah di provinsi lain, asalkan tidak di ibu kota negara.

Pilgub Jakarta kali ini benar-benar menjadi "perang bintang". Tiga pasangan yang bertarung adalah sosok-sosok yang familiar di mata publik. Ada mantan menteri, pengusaha ternama, dan putra mantan presiden.

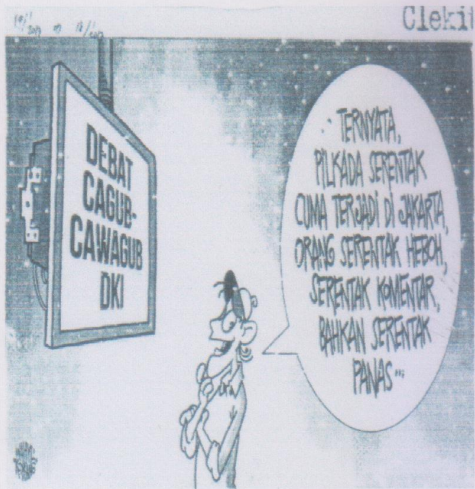
Pertarungan menuju DKI-1 semakin panas ketika salah seorang calon gubernur menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Beragam isu bergerak liar. Media sosial menjadi medan pertempuran yang sengit antar pendukung. Persidangan yang seharusnya berada di ranah hukum mulai diseret-seret atau dimasuki kepentingan politik. Situasi ini jelas bukan pemandangan yang baik bagi rakyat Indonesia.

Pilkada adalah ajang beradu ide dan gagasan. Para calon kepala daerah seharusnya diadu dalam pemaparan program. Tidak malah saling menjatuhkan.

Dan, ingat, pilkada serentak 2017 tidak hanya di Jakarta. Ada Aceh yang juga istimewa. Selain pemilihan gubernur, 20 kabupaten dan kota di Aceh akan menggelar pesta demokrasi. Keberhasilan pilkada Jakarta mungkin mengalahkan daerah-daerah lain. Tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa tanggung jawab menyelesaikan pilkada juga ada di 100 daerah lain di penjuru tanah air. (*)

(JP 170202)

2.



Kutipan :
Debat cagub-cawagub DKI
" Ternyata PILKADA serentak Cuma terjadi di Jakarta, orang serentak heboh, serentak komentar, bahkan serentak panas,,, "
(JP, 170114)

(JP 170118)

4 | RABU 18 JANUARI 2017

JATI DIRI

Celah Netralitas ASN

NETRALITAS 100 persen aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada memang sulit diterapkan. Ancaman sanksi sudah dirumuskan pemerintah. Namun, kasus ASN yang membantu pasangan calon (paslon) dalam pilkada selalu saja muncul. Efeknya bahkan diyakini bisa lebih besar daripada kinerja tim sukses.

Bagi ASN, khususnya yang memiliki jabatan strategis, netralitas memang bisa menjadi dilema. Terlebih bila ada petahana (*incumbent*) yang mencalonkan diri. Tidak jarang mereka diminta membantu kemenangan, tentu saja secara diam-diam. Ketika posisi petahana sangat kuat, sulit bagi ASN menolak permintaan semacam itu. Bisa-bisa posisinya digusur saat sang petahana terpilih lagi.

Kondisi sebaliknya mungkin juga terjadi. Ada ASN yang secara sengaja mendekati kepada paslon kuat. Harapannya, dia mendapat jabatan strategis saat sang paslon memenangkan pilkada. Kalau sudah semacam itu, mereka akan memanfaatkan jaringan dan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan kemenangan paslon.



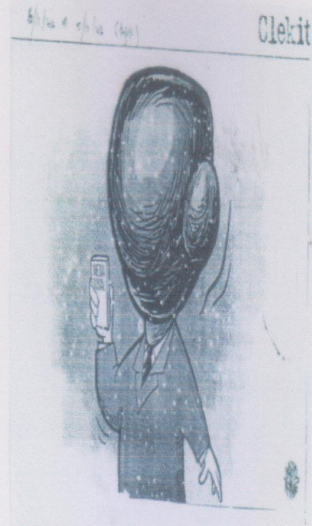
ILUSTRASI: DAVIDJANA POS

Bukti masih adanya ASN yang bersikap tidak netral dalam pilkada adalah laporan yang masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hingga sebulan sebelum pemungutan suara, komisi tersebut telah menerima 53 laporan ASN yang terlibat upaya kemenangan paslon. Sudah dikeluarkan rekomendasi untuk 35 kasus, sedangkan 18 lainnya masih menunggu.

Fakta di lapangan, bisa saja jumlah kasus ASN yang berpihak jauh lebih besar. Sebab, yang masuk ke KASN hanya bersifat laporan. Tentu yang melapor adalah pihak yang merasa dirugikan. Hal itu akan sulit muncul pada pilkada dengan paslon tunggal.

Yang tak kalah penting adalah kejelian pengawasan pemilu dan KASN dalam melihat bentuk-bentuk sikap keberpihakan ASN dalam pilkada. Pelanggaran kasatmata mungkin hanya akan terlihat ketika ASN tersebut menghadiri kampanye paslon. Namun, ada banyak keberpihakan lain yang sebenarnya harus lebih diwaspadai. Misalnya pengerahan massa secara diam-diam ke tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan kepala dinas terhadap anak buahnya. Plus keluarganya. Pengerahan semacam itu bisa dilakukan dengan ancaman tertentu.

Modus lainnya bisa berupa mencairkan tunjangan tertentu bagi ASN pada saat mendekati hari pemungutan suara. Apalagi jika tunjangan tersebut terkait dengan instansi yang cakupannya sangat luas. Antara lain dinas pendidikan yang menaungi ribuan guru. Saat pencairan tunjangan atau insentif apa pun yang berasal dari APBD, biasanya ada modus "minta dukungan". Sepanjang netralitas ASN dianggap penting, penggunaan fasilitas dan jaringan pemerintahan semacam inilah yang sesungguhnya harus lebih diwaspadai dalam pelaksanaan pilkada. (*)



Kutipan :
" Media sosial " (JP 161209)

JATI DIRI

Jumat, 9/12/2016

Hoax dan Ujaran Kebencian.

MEMBACA linimasa medsos sekarang ini harus ekstra menyiapkan diri. Harus pandai-pandai melakukan verifikasi plus menyiapkan amunisi ke-sabaran. Sebab, linimasa medsos sekarang ini didominasi tidak hanya berita *hoax*, tetapi juga ujaran kebencian.

Sudah tidak jelas lagi apakah medsos yang menjadi panas gara-gara iklim politik (terutama pilgub DKI), ataupun iklim politik yang jadi makin panas gara-gara isi medsos.

Polisi sudah menindak sebagian pelaku penyebar *hoax*. Meski terkesan represif, langkah tersebut dipertukan untuk mengerem laju penyebaran berita *hoax*. Yang pada gilirannya mengakibatkan polarisasi di masyarakat makin tajam.

Jika tidak ada *shock therapy*, masyarakat akan merasa semakin bebas *posting* apa pun dengan cepat. Meskipun sudah disindir dengan pepatah "apa yang lebih cepat dari cahaya? Ya, orang bodoh *share* berita *hoax*", tetap saja *hoax* beredar. Celakanya, sangat jarang *netizen* yang jika ketahuan berita yang di-*share*-nya *hoax* lantas mengklarifikasi dan minta maaf. Meski klarifikasi pun tak membantu menyelesaikan, sebab berita itu sudah kadung viral.

Jamak diketahui bahwa *hoax* ini memang bisnis tersendiri dan kerap dijadikan salah satu strategi untuk kepentingan kelompok tertentu. Mulai kelas kakap seperti *Central European News* (CEN) yang bernilai ribuan dolar per hari hingga *hoax* kelas lokal Indonesia yang bernilai jutaan rupiah per hari. Tapi, khusus di Indonesia, karakter berita *hoax*-nya lebih politis dan cenderung membuat polarisasi. Ini yang membuat bos Facebook Mark Zuckerberg sampai membuat sikap untuk lebih menyeriusi persoalan *hoax* di platform medsos miliknya itu.



Ini tentu berkaitan dengan kondisi *netizen* di Indonesia sendiri. Pasca-Pilpres 2014 lalu, bukannya menurun, polarisasi yang terjadi kian tajam. Ini terlihat pada fenomena soal Ahok, demo 411, 212, dan 412. Perang di dunia maya jauh lebih kasar. Saling *unfriend*, saling hina antarteman kini adalah hal yang biasa terjadi. Secara umum, tidak pernah ada dialog yang konstruktif dalam perdebatan di dunia maya.

Untuk itu, salah satu karakter yang harus dikampanyekan secara gencar adalah verifikasi terhadap berita yang tersebar. Berita di internet jarang dibuat dengan kode etik jurnalistik yang ketat seperti dalam pers *mainstream*. Proses seperti inilah yang harus ditunjukkan sehingga *netizen* kemudian melek dan paham seberapa berbahaya berita-berita *hoax* tersebut.

Setidaknya, sebelum men-*share* berita, ada baiknya *netizen* melakukan verifikasi terlebih dahulu. Cara paling gampang adalah mencarinya di media *mainstream*. Jika tak ada satu pun media *mainstream* yang memuatnya, hendaknya curiga dan melakukan verifikasi lebih ketat lagi. (*)